

ABSTRAK

Wiwin Julaeha. 1158010326. Implementasi Kebijakan Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu Legislatif (Studi Kasus Pemenuhan Keterwakilan Perempuan Oleh Partai Gerindra di Kabupaten Subang Pada Tahun 2019).

Pemenuhan hak politik perempuan merupakan prasyarat dalam mewujudkan keterwakilan demokrasi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Namun realitas politik menunjukkan keterwakilan perempuan di Kabupaten Subang berdasarkan hasil pemilu pada tahun 2014 hanya sebesar 16%. Indonesia memiliki UU Pemilu yang berbeda dalam setiap periode pemilihan. Untuk pemilu tahun 2019, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menegaskan bahwa dalam bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Adanya kebijakan ini mengharuskan partai politik peserta pemilu untuk memenuhi keterwakilan perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan keterwakilan perempuan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Subang Pada Tahun 2019 oleh Partai Gerindra dan mengetahui berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pemenuhan kebijakan keterwakilan perempuan termasuk upaya kualitas kontrol yang dilakukan oleh Partai Gerindra terhadap calon anggota legislatif perempuan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang memanfaatkan sumber data primer dan sekunder yang diperoleh melalui tiga teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun data dan informasi yang diperoleh akan dianalisis sesuai teknik analisis data Miles dan Huberman yang terdiri dari kegiatan reduksi data, penyajian data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan keterwakilan perempuan di Kabupaten Subang mencapai 41,90%, sedangkan pemenuhan keterwakilan perempuan oleh Partai Gerindra mencapai 40,82% yang menunjukkan bahwa kebijakan keterwakilan perempuan dapat diimplementasi dengan baik oleh Partai Gerindra karena didukung oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Adapun kendala pemenuhan muncul baik dari pihak internal partai yang belum mampu menciptakan proses rekrutmen secara efektif maupun dari pihak perempuan yang belum siap terlibat dalam politik praktis karena sistem kaderisasi yang ada belum berjalan secara sistematis dan berkelanjutan. Sedangkan untuk menciptakan kualitas kontrol bagi caleg perempuan, Partai Gerindra berupaya menciptakan proses seleksi yang ketat melalui tahapan penyaringan, penjaringan, dan verifikasi.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Keterwakilan Perempuan, Partai Gerindra